

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah system yang *powershare* pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Kewenangan dalam pengelolaan keuangan merupakan kewenangan penuh setiap pemerintah daerah.

Akuntansi Keuangan Daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintahan daerah. Akuntansi Keuangan Daerah ini diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh pemerintah daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981.

Bastari (2004) mengemukakan sistem lama (MAKUDA) dengan ciri-ciri antara lain *single entry* (pembukuan tunggal), *incremental budgeting* (penganggaran secara tradisional yang rutin dan pembangunan) dan pendekatan anggaran berimbang dinamis sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan daerah, karena beberapa alasan yaitu tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain dapat memberikan laporan neraca, tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas sehingga manajemen atau publik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah, sistem yang lama (MAKUDA) ini juga tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kinerja sesuai ketentuan PP No. 105 tahun 2000, dan PP No. 108 tahun 2000.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itu sistem akuntansi menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi

serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Proses akuntansi tersebut didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu, maka hal ini terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan di daerah.

Organisasi pada pemerintah daerah, sistem akuntansi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang digunakan pada saat sekarang ini adalah sistem akuntansi yang mengacu pada kebijakan perundangan yaitu Permendagri No. 13/2006 yang kemudian direvisi pada Permendagri No.59/2007 dan direvisi kembali pada Permendagri No.21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengembangan sistem melalui perencanaan dan realisasi yang sesuai tujuan, agar sistem yang dikembangkan tersebut dapat diterima.

Agar kegunaan SAKD ini dapat meningkat maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung penerapan SAKD tersebut , diantaranya ada pelatihan, kejelasan tujuan serta adanya dukungan atasan dalam sistem akuntansi keuangan daerah agar kegunaan SAKD dapat meningkat dalam

memenuhi tuntutan masyarakat, karena SAKD dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, efektif, dan akuntabel. Di dalam instansi pemerintah khususnya daerah factor perilaku organisasi seperti pemberian pelatihan seperti workshop, seminar dan diklat merupakan hal yang wajib di berikan kepada karyawan. Baik itu pelatihan yang wajib diikuti dan juga pelatihan untuk dapat menguasai suatu sistem atau aplikasi yang baru.

Perpindahan dari sistem yang lama beralih kepada sistem akuntansi berbasis akrual ini membutuhkan penyesuaian oleh para SKPD. Pelatihan terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pun di selenggarakan oleh instansi untuk SKPD. Dengan adanya pelatihan ini, dapat mengasah keterampilan SKPD dalam menyusun laporan keuangan mulai dari penjurnalan transaksi sampai penyusunan laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan SKPD yang dihasilkan akuntabel dan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan.

Pada hakekatnya dalam pemerintahan daerah belum dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas karena belum sepenuhnya memahami penerapan standar akuntansi pemerintahan daerah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada SAP. Informasi yang kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya (*reliable information*) yang sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan mengidentifikasi risiko.

Reliabilitas informasi akan tumbuh dengan minimnya tingkat kesalahan penyajian data, tingginya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, dan netralitas dalam pengungkapan.

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah lemah akan menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah meliputi: *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi. *Reliability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya. Efisien, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat penggunaan biaya dan kegunaan SAKD selanjutnya adalah Efektif, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.¹

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan

¹ Cynthia Carolina. *Pengaruh Kejelasan Tujuan dan dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi*

kesuksesan implementasi. Faktor perilaku yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi faktor organisasional (pelatihan, dukungan atasan, dan kejelasan tujuan).

Dengan demikian untuk menjawab tantangan yang ada, maka sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) mulai diperkenalkan dan diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia, dan kesuksesan dari sistem tersebut tergantung dari faktor keperilakuan dalam organisasi.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk dapat melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS PERILAKU ORGANISASI PADA KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat membuktikan faktor perilaku organisasi terhadap SAKD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dalam pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai perumusan masalah, yakni:

1. Apakah indikator pelatihan dari perilaku organisasi dapat meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
2. Apakah indikator dukungan atasan dari perilaku organisasi dapat meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
3. Apakah indikator kejelasan tujuan dari perilaku organisasi dapat meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Mengetahui apakah pelatihan dapat meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
- b. Mengetahui apakah dukungan atasan dapat meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
- c. Mengetahui apakah kejelasan tujuan dapat meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Menambah ilmu pengetahuan tentang perilaku organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD).

b. Bagi Institusi

Dapat dijadikan suatu masukan kepada organisasi daerah tentang faktor perilaku organisasi yang dapat meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD).

c. Bagi Fakultas

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi oleh mahasiswa, dosen, dan pihak yang membutuhkannya.